

BAB II LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Tingkat Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan disiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan.

2. PA/ KPA atau Satuan Kerja

Pengertian satuan kerja yang diamanatkan dalam **Peraturan Menteri**

Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 Pasal 1 Ayat 20 yaitu:

“Satuan kerja adalah kuasa pengguna anggaran / pengguna barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara / lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.”

a. Rekonsiliasi

Pengertian rekonsiliasi yang diamanatkan dalam **Peraturan Menteri**

Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 Pasal 1 Ayat 19 yaitu:

“Rekonsiliasi adalah proses penyocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem / subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.”

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2008 pasal 9 ayat (1) (2)

(3)yaitu :

1. Laporan keuangan belanja subsidi dan belanja lain-lain tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dalam bentuk laporan realisasi anggaran, neraca dan ADK, harus direkonsiliasi terlebih dahulu setiap bulan dengan kantor pelayanan perbendaharaan negara atau direktorat pengelolaan kas negara selaku kuasa bendahara umum negara.
2. Laporan keuangan belanja subsidi dan belanja lain-lain tingkat pengguna anggaran (PA) dalam bentuk Administrasi Keuangan (ADK) dan laporan keuangan sebelum dikirimkan kepada menteri keuangan c.q Direktur jenderal perbendaharaan, harus dilakukan rekonsiliasi dengan direktorat jenderal perbendaharaan c.q direktorat akuntansi dan pelaporan keuangan.
3. Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi (BAR), dengan menggunakan format berita acara rekonsiliasi (BAR) sebagaimana ditetapkan dalam lampiran VI peraturan menteri laporan keuangan ini.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 33 dinyatakan

“bahwa dalam pengendalian intern sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus diciptakan prosedur rekonsiliasi antara transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Bendahara Umum Negara/Daerah.

Sehingga pelaksanaan rekonsiliasi ditujukan untuk menghasilkan data yang kredibel dan andal yang akan digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Rekonsiliasi eksternal KPPN merupakan pencocokan data antara

KPPN selaku Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara-Daerah (UAKBUN-D) dengan satuan kerjaselaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). Rekonsiliasi antara KPPN dengan UAKPA dilakukan melalui:

1. Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran
2. Rekonsiliasi Neraca

Apabila Laporan Hasil Rekonsiliasi antara data SAU dan SAI telah sama makadibuatkan berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Kepala KPPN selaku KuasaBendahara Umum Negara dan Kepala Satker selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),Berita Acara Rekonsiliasi dan Laporan Hasil Rekonsiliasi dibuat 2 (dua) rangkap, 1 (satu)rangkap dikirimkan kesatker dan 1 (satu) rangkap diarsipkan.

b. Pagu anggaran satuan kerja

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 mendefinisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut pasal 11 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Belanja negaradi pergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satu ciri utama sektor publik adalah pelayanan pada masyarakat, dalam pelaksanaan pelayanan ini satuan kerja

telah diberikan anggaran dalam jumlah tertentu yang akan digunakan dalam pembiayaan proses kegiatan selama satu tahun anggaran. Pagu merupakan batas tertinggi anggaran yang diberikan kepada suatu satuan kerja. Perbedaan besar pagu anggaran yang tersedia bagi satuan kerja salah satunya disebabkan perbedaan beban kerja, Selain itu kebutuhan akan pendanaan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan operasional juga dapat menimbulkan perbedaan besar pagu anggaran antar satker. Satker dengan kegiatan operasional yang besar akan lebih banyak membutuhkan anggaran belanja pegawai dan barang dibandingkan satker dengan kegiatan operasional lebih kecil. Namun terdapat beberapa satuan kerja dengan kegiatan operasioanal sedikit, namun memiliki pagu belanja yang besar terutama pada belanja modal. Semakin besar pagu anggaran satker maka waktu penyelesaian rekonsiliasi data SAI menjadi semakin panjang.

c. Realisasi belanja satuan kerja

Belanja satuan kerja merupakan aktifitas yang dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan satuan kerja. Realisasi belanja akan mengalami perubahan setiap bulannya, berbagai pertimbangan mempengaruhi besar realisasi satuan kerja. Satuan kerja dengan kegiatan yang besar akan membutuhkan anggaran untuk belanja yang besar. Tujuan operasional sektor publik adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dengan belanja yang besar menunjukkan semakin besar pelayanan yang diberikan suatu satuan kerja kepada masyarakat. Realisasi belanja satuan kerja dapat mempengaruhi pelaksanaan pertanggungjawaban dan pelaporan satuan kerja.

Semakin besar realisasi belanja maka waktu penyelesaian rekonsiliasi data SAI menjadi semakin panjang.

d. Aset Satuan Kerja

Aset merupakan salah satu komponen dalam neraca. Aset bagi sebuah perusahaan menunjukkan kekayaan yang dimiliki perusahaan yang dapat digunakan untuk memperoleh pendapatan. Bagi satuan kerja, aset yang dikelola selain digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi yang diembannya, juga dapat menunjukkan besar aktifitas operasional. Salah satu bagian pada aset yang dikelola selama satu tahun anggaran oleh suatu satker adalah uang persediaan/kas dibendahara pengeluaran. Besar nilai kas dibendahara pengeluaran akan berbeda antara satu satker dengan yang lain, karena penentuannya memperhatikan besar pagu anggaran yang dimiliki. Aset satuan kerja pada dasarnya merupakan barang milik negara yang dikelola oleh satuan kerja tersebut. Satuan kerja dengan aset yang besar akan semakin sulit dalam melakukan pengelolaan, hal ini disebabkan pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, penghapusan sampai pelaporan aset sebagai barang milik negara terdapat aturan yang melandasinya. Hal ini berbeda dengan sektor swasta dimana pengelolaan dan pemanfaatan aset lebih mudah untuk dilakukan. Oleh karena itu bagi pengelola yang memiliki aset dengan nilai yang besar akan mempengaruhi proses pelaporan yang dilakukan. Ukuran aset yang berbeda-beda antar satuan kerja akan berpengaruh pada waktu penyelesaian rekonsiliasi data SAI antar satuan kerja. Semakin besar aset yang dikelola maka waktu penyelesaian rekonsiliasi data SAI menjadi semakin lama

e. Latar Belakang Pendidikan

Menurut Nazier (2009) “latar belakang pendidikan mempunyai peran yang sangat penting karena dengan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan dalam proporsi tertentu diharapkan dapat memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh suatu pekerjaan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat.”

Sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan akuntansi atau setidaknya mengalami pengalaman dibidang keuangan yang sangat dibutuhkan dalam suatu pekerjaan yang berhubungan dengan penyusunan dalam laporan keuangan. Namun terdapat permasalahan terkait latar belakang pendidikan pendidikan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintahan. Belum ada kebijakan rekrutmen pegawai berlatar belakang akuntansi, dan adanya anggapan bahwa pegawai yang bukan berlatar belakang akuntansi mampu melaksanakan tugas dengan modal pendidikan dan pelatihan serta bimbingan. Latar belakang pendidikan bagi satuan kerja berpengaruh terhadap kemampuan baik kemampuan teknis maupun kemampuan manajerial. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai maka kemampuan dalam memecahkan suatu masalah juga akan semakin baik. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka waktu penyelesaian rekonsiliasi menjadi semakin pendek.

f. Pelatihan

Menurut Bernardin dan Russel (1998:172) dalam Cut Zurnali (2004) “pelatihan didefinisikan sebagai usaha pengenalan untuk mengembangkan kinerja tenaga kerja pada pekerjaan yang dipikulnya atau juga sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaannya.”

Menurut DeCenzo dan Robin (1999:227) dalam Cut Zurnali (2004)

“pelatihan adalah suatu pengalaman pembelajaran didalam mencari perubahan permanen secara relatif pada suatu individu yang akan memperbaiki kemampuan dalam melaksanakan pekerjaannya.”

Hal ini berarti melakukan perubahan perilaku, sikap, keahlian, dan pengetahuan yang khusus atau spesifik. Dan agar pelatihan menjadi efektif maka didalam pelatihan harus mencakup suatu pembelajaran atas pengalaman-pengalaman, pelatihan harus menjadi kegiatan keorganisasian yang direncanakan dan dirancang didalam menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang teridentifikasi.

Tujuan diadakan pelatihan agar para pegawai dapat menguasai pengetahuan, keahlian dan perilaku yang ditekankan dalam program-program pelatihan dan untuk diterapkan dalam aktivitas sehari-hari para karyawan. Penguasaan terhadap beban kerja yang dimiliki akan meningkatkan produktifitas kerja seseorang. Dengan produktifitas yang tinggi penyelesaian pekerjaan dengan benar dan sesuai waktu yang ditentukan akan tercapai. Melalui pelatihan tingkat produktifitas seseorang dapat ditingkatkan. Semakin banyak melakukan pelatihan yang diikuti maka waktu penyelesaian pekerjaan menjadi semakin pendek.

g. Pengalaman Kerja dan Keterampilan

Pengalaman digunakan untuk merujuk pada pengetahuan dan keterampilan tentang sesuatu yang diperoleh lewat keterlibatan atau berkaitan dengannya selama periode tertentu. Untuk menguasai

keterampilan baru seseorang akan membutuhkan waktu untuk menguasainya. Waktu yang dibutuhkan tersebut lebih dikenal dengan kurva belajar. Kurva belajar seseorang dapat dipersingkat dengan melakukan pelatihan maupun pengembangan kemampuan dan peningkatan motivasi.

Menurut Raymond (2011:523)

“hubungan antara pengembangan, pelatihan, dan karir dalam pengembangan kemampuan karyawan adalah pengembangan mengacu pada pendidikan formal, pengalaman kerja, hubungan, penilaian kepribadian dan kemampuan yang membantu para karyawan mempersiapkan diri di masa depan sedangkan pelatihan berfokus pada membantu kinerja karyawan pada pekerjaan saat ini.”

Seseorang yang melakukan suatu pekerjaan yang sama secara berulang, maka orang tersebut akan menjadi lancar dalam melakukan pekerjaan tersebut. Dengan semakin lancar seseorang dalam melakukan pekerjaan maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut menjadi semakin pendek.

Pengalaman akan sangat membantu satuan kerja dalam melaksanakan tugasnya. Berbagai kesalahan yang terjadi dan dihadapi satuan kerja akan membantu dalam menghadapi permasalahan serupa yang ditemui. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki seseorang, keterampilan dalam menyelesaikan pekerjaan juga semakin baik. Keterampilan merupakan kemampuan individu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan dengan tepat sesuai ketentuan yang ditetapkan. Selain dari pengalaman, keterampilan juga dapat diperoleh dari pelatihan. Semakin banyak

pengalaman dan keterampilan yang dimiliki maka waktu penyelesaian rekonsiliasi menjadi semakin pendek.

h. Up date aplikasi SAKPA

Sistem terkomputerisasi telah digunakan dalam proses rekonsiliasi data SAI antara satuan kerja dengan KPPN. Rekonsiliasi data SAI merupakan proses pencocokan data transaksi dengan menggunakan dokumen sumber yang sama dan diproses menggunakan suatu perangkat lunak berupa aplikasi SAKPA yang digunakan pada satuan kerja dan aplikasi VERA yang digunakan pada KPPN. Terjadinya perubahan terhadap kebijakan akuntansi mengakibatkan perubahan pada aplikasi VERA maupun SAKPA, perubahan ini dilakukan melalui *up date* aplikasi. Terjadinya perbedaan antara aplikasi SAKPA dan Aplikasi VERA yang telah mengalami perubahan akan menimbulkan ketidakcocokan data keluaran yang dihasilkan dan akan mempengaruhi waktu penyelesaian rekonsiliasi data SAI. Semakin banyak *update* aplikasi SAKPA maka waktu penyelesaian rekonsiliasi data SAI menjadi semakin panjang.

i. Penggunaan elektronik rekonsiliasi (e-rekon)

Menurut Kadir (2005:2)

“Teknologi informasi adalah gabungan dari teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim informasi.”

Penggunaan teknologi informasi juga menggunakan sarana teknologi jaringan internet (web) sebagai sarana komunikasi. Penggunaan sarana internet dalam berkomunikasi memiliki beberapa keunggulan diantaranya waktu yang relatif lebih singkat dan mengabaikan perbedaan jarak yang besar. Dalam sektor publik pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dengan lebih menyederhanakan proses layanan, meningkatkan keandalan dan akurasi data yang dihasilkan, serta untuk mempersingkat waktu proses layanan. Semakin sering satker menggunakan e-rekon dalam rekonsiliasimaka waktu penyelesaian rekonsiliasi data SAI menjadi semakin pendek.

3. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu (*timeliness*) merupakan salah satu faktor penting dalam menyajikan suatu informasi yang relevan. Karakteristik informasi yang relevan harus mempunyai nilai prediktif dan disajikan tepat waktu. Laporan keuangan sebagai sebuah informasi akan bermanfaat apabila informasi yang dikandungnya disediakan tepat waktu bagi pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuannya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya.

Kebutuhan akan ketepatan waktu pelaporan keuangan secara jelas telah disebutkan dalam kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan bahwa ketepatan waktu merupakan salah satu karakteristik kualitatif yang

harus dipenuhi, agar laporan keuangan yang disajikan relevan untuk pembuatan keputusan.

Menurut Chambers dan Penman (1984: 21) mendefinisikan ketepatan waktu dalam dua cara, yaitu:

- a. ketepatan waktu didefinisikan sebagai keterlambatan waktu pelaporan dari tanggal laporan keuangan sampai tanggal melaporkan,
- b. ketepatan waktu ditentukan dengan ketepatan waktu pelaporan relatif atas tanggal pelaporan yang diharapkan.

4. Akurasi Laporan Keuangan

Pengertian akurasi menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)** adalah ketelitian.

Menurut Azhar (2008:38) “akurasi adalah informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Pengujian akurasi dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berbeda, apabila pengujian tersebut menghasilkan hasil yang sama maka data tersebut dianggap akurat.

Menurut (Standar Akuntansi Pemerintah : kk-11-13) Akurasi mempunyai karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan persyaratan yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintahan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki :

- a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat

di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Informasi laporan keuangan yang relevan :

1. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu.

2. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

3. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

4. Lengkap

Informasi akuntansi laporan keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangandiungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b. Andal

Informasi yang andal memenuhi karakteristik :

1. Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2. Dapat diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat di uji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

3. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakna akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

5. Laporan Keuangan

Menurut Prasetya (2005:17) “Laporan Keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan atau pihak-pihak yang berkepentingan.”

Pengertian laporan keuangan yang diamanatkan dalam **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 Pasal 1 Ayat 24** yaitu:

“Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.”

Kemudian **Menurut Martono dan Agus(2010:51)** “Laporan Keuangan (*Financial Statement*) merupakan ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu.”

Kemudian **Menurut Fahmi (2011:2)** “Laporan Keuangan yaitu merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.”

6. Tujuan dan manfaat laporan keuangan

Menurut Sukardi dan kuraniawan (2010:187) Tujuan laporan keuangan :

1. Sebagai bahasa yang mudah dimengerti oleh semua pihak.
2. Menunjukkan logika hubungan timbal-balik antara pos-pos dalam laporan keuangan.

Sedangkan **Menurut Fahmi (2011:6)** “tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter .”

Manfaat laporan keuangan

Menurut Martono dan agus (2010:52) laporan keuangan yang baik dan akurat dapat memberikan manfaat antara lain dalam :

1. Pengambilan keputusan investasi
2. Keputusan memberikan kredit
3. Penilaian aliran kas
4. Penilaian sumber ekonomi
5. Melakukan klaim terhadap sumber dana
6. Menganalisis perubahan yang terjadi terhadap sumber dana
7. Menganalisis pengguna dana

Menurut Fahmi (2011:4) “manfaat laporan keuangan adalah untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu dan mengetahui sudah sejauh mana perubahan mencapai tujuannya.”

7. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Menurut Prasetya (2005:8) penyusunan laporan keuangan memiliki beberapa tujuan, yaitu:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut disampaikan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik.

b. Manajerial

Menyediakan informasi keuangan untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta mempermudah pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang, dan ekuitas dana.

c. Transparansi

Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

8. Prinsip Penyusunan Laporan Keuangan

Menurut Prasetya (2005:8) penyusunan setiap laporan keuangan, tak terkecuali laporan keuangan daerah, harus sesuai dengan beberapa prinsip dasar yang tercermin dalam sifat serta ciri laporan tersebut. Prinsip-prinsip itu adalah :

a. Entitas (*Accounting Entity*)

Fokus perhatian akuntansi adalah entitas atau lembaga tertentu yang akan dilaporkan, bukan lembaga lainnya.

b. Pengukuran (*Measurement*)

Akuntansi merupakan media pengukuran sumber-sumber ekonomi (*economic resources*) dan kewajiban (*liability*). Akuntansi harus mengukur hasil transaksi dan ukuran yang dipakai adalah unit moneter.

c. Periode Waktu (*Time Period*)

Laporan keuangan menyajikan informasi untuk suatu waktu atau periode tertentu. Laporan harus memiliki batas waktu yang jelas.

d. Unit Moneter (*Monetary Unit*)

Pengukuran setiap transaksi dilakukan dalam bentuk nilai atau unit uang.

e. *Accrual*

Menentukan pendapatan dan biaya dari posisi harta dan kewajiban ditetapkan berdasarkan kejadiannya, tanpa melihat apakah transaksi pembayaran atau penerimaan kas telah dilakukan atau belum.

f. Harga Pengukuran (*Exchange Price*)

Nilai dalam laporan keuangan didasarkan pada harga pertukaran ketika terjadi transaksi.

g. Penaksiran (*Aproximation*)

Dalam akuntansi, kita tak dapat menghindari masalah penaksiran seperti taksiran umur, taksiran harga, pemilihan prinsip yang digunakan, dan sebagainya.

h. Pertimbangan (*Judgement*)

Dalam penyusunan laporan keuangan diperlukan berbagai pertimbangan berdasarkan keahlian, baik pertimbangan memilih alternatif prinsip

maupun pemilihan cara penyajian laporan keuangan.

i. Bertujuan Umum (*General Purpose*)

Informasi dalam laporan keuangan ditunjukkan untuk umum, bukan pengguna khusus.

j. Laporan terkait (*Interrelated Statement*)

Neraca, daftar laba/rugi, dan laporan sumber dan penggunaan kas mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling terkait.

k. *Substance Over Form*

Akuntansi lebih menekankan kenyataan ekonomis suatu kejadian daripada bukti legal atau formalnya.

l. Materialitas (*Materiality*)

Laporan keuangan hanya memuat informasi yang dianggap penting. Setiap pertimbangan dilakukan dengan tetap melihat signifikannya secara umum.

Indikator materialitas terkait dengan dampaknya terhadap laporan keuangan.

B. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah :



C. Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2010:93) “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian”. Hipotesis penelitian ini adalah kepatuhan rekonsiliasi satuan kerja berpengaruh terhadap akurasi laporan keuangan.